

Plagiasi Tiga Jesselyn Marchella

by Jesselyn Marchella

Submission date: 02-Jul-2021 11:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 1614817357

File name: artikel_Jesselyn_Marchella_untuk_plagiasi.docx (53.14K)

Word count: 5405

Character count: 34686

APAKAH WAJIB PAJAK BERMORAL SAAT COVID-19?

Abstrak - Apakah Wajib Pajak Bermoral Saat Covid-19?

Tujuan Utama - Untuk melihat apakah terdapat perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan faktor demografi pada masa Covid-19.

Metode - Sampel menggunakan WPOP yang berada di wilayah Surabaya Barat dan Timur. Data diolah dengan analisis regresi berganda menggunakan SPSS.

Temuan Utama - Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi moral pajak dari aspek demografi saat Covid-19. Umur lebih tua memiliki tingkat moral pajak lebih tinggi dari umur lebih muda, wanita memiliki moral pajak yang lebih tinggi dibandingkan pria, dan semakin tinggi tingkat pendidikan akan memiliki moral pajak yang lebih tinggi. Sedangkan faktor sumber penghasilan dan kepercayaan tidak berpengaruh terhadap moral pajak.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat aturan-aturan yang lebih jelas mengenai insentif perpajakan. Pemerintah juga dapat menyosialisasikan peraturan-peraturan tersebut untuk meningkatkan moral pajak.

Kebaruan Penelitian - Penelitian ini menguji moral pajak seseorang ketika berada dalam masa Covid-19 yang dimungkinkan menurunkan tingkat moral pajak seseorang.

Abstract - Are Taxpayers Have High Moral Standards During The Covid-19?

Main Purpose - To see if there are differences in perceptions of tax morale, based on demographics factors during Covid-19.

Method - The sample uses individual taxpayers in the West and East Surabaya. Data processed by multiple regression analysis using SPSS.

Main Findings - The study indicates that there are differences in tax moral perceptions from the demographic aspect during Covid-19. Older age has better tax morale than younger age, women have better tax morale level than men, and high level of education has better tax morale. While the source of income and beliefs have no effect on tax morale.

Theory and Practical Implications - Therefore, the government needs to make clearer rules regarding tax incentives. The government can also socialize these regulations to increase tax morale.

Novelty - This study examines a person's tax morale in the Covid-19 period which is possible to reduce a person's tax morale level.

Kata kunci: moral pajak; Covid-19; demografi

Akibat adanya Covid-19, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami kontraksi, baik di sektor penerimaan maupun pengeluaran. Dalam hal penerimaan pajak yang merupakan komponen terbesar dalam APBN, mencatat penurunan realisasi sekitar 19%, dibandingkan penerimaan APBN 2019. Berdasarkan data tersebut, dapat diduga bahwa pandemi menjadi faktor penyebab utama turunnya penerimaan pajak. Sebagaimana disampaikan di atas, kondisi pandemi sejauh ini telah memicu munculnya krisis keuangan, yang sedikit banyak menghambat efektivitas pengumpulan pajak. Munculnya krisis keuangan tersebut ditengarai mempengaruhi moral wajib pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pada saat perekonomian mengalami kemerosotan secara serentak dan menyeluruh, maka WP akan cenderung membayar pajak tidak dengan benar dan jujur; bahkan diduga, WP telah melakukan praktik penghindaran dan penggelapan pajak demi mengatasi efek dari krisis keuangan. Dugaan tersebut sangat beralasan, mengingat pada saat krisis keuangan, hampir seluruh aktivitas bisnis mengalami tekanan finansial, yang memungkinkan mereka mengurangi sumber dayanya akibat kesulitan pembiayaan. Sebagai akibat ikutannya, WP kemudian berada pada posisi dilematis, antara patuh membayar pajak atau berupaya mengurangi beban pajak yang ia miliki. Dilema inilah yang kemudian memunculkan issue moral pajak. Dalam masa Covid-19, moral pajak berkaitan dengan prinsip *ability to pay theory* yang menjelaskan dimana jumlah pajak yang dikenakan pada seseorang harus berbanding lurus dengan kemampuan seseorang untuk membayar pajak (Ocheni, 2015). Dengan munculnya issue ini, penelitian ingin mendorong kinerja akuntansi pajak sebagai alat pertanggungjawaban direktorat jenderal pajak (DJP) kepada pemerintah dan masyarakat, khususnya saat pandemi Covid-19.

Moral pajak diartikan seperti sebuah nilai dimana seseorang rela melakukan sesuatu tanpa meminta timbal balik demi membiayai pengeluaran umum negara. Konsep moral pajak secara umum terkait erat dengan etika wajib pajak (WP) sehubungan dengan tanggung jawabnya (Widianto, 2015). Sikap dan perilaku seseorang, dalam konteks pemenuhan kewajiban pajak, biasanya dipengaruhi

secara langsung oleh moral pajak. Dalam konteks yang lain, moral pajak tidak sekadar mengukur perilaku, melainkan juga sikap dan pendirian individu. WP diasumsikan akan melakukan penghindaran pajak, yang kemudian membutuhkan pengetahuan akan faktor-faktor apa saja yang dapat mengurangi sikap negatif para WP (Benk et al., 2016). Adanya perbedaan dari sisi demografis seseorang, diduga dapat mempengaruhi tingkat moral pajaknya. Adanya perbedaan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, sumber penghasilan, dan agama dapat menandai adanya perbedaan persepsi dalam melakukan kewajiban pajak. WP pada hakikatnya mempunyai sudut pandang yang tidak sama, sehingga akan muncul reaksi yang tidak sama pula akan kepatuhan pajak meski memiliki tingkat moral yang sama.

Sejumlah penelitian sebelumnya menghasilkan beberapa temuan terkait faktor demografi yang mempengaruhi moral pajak. Penelitian oleh Mulyani et al. (2020) membuktikan dimana umur berpengaruh positif terhadap moral pajak. Simpulan ini diakibatkan karena WP pada umur muda (sekitar 20 hingga 30 tahun) biasanya akan terikat kepada suatu instansi pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya terkait undang-undang pajak yang ada. Selain itu, jenis kelamin juga dapat mempengaruhi tingkat moral pajak. WP pria dikatakan lebih mementingkan uang daripada WP wanita; dan WP wanita lebih memiliki sikap etis, sehingga WP wanita dinilai memiliki moral pajak lebih tinggi daripada pria. Jika melihat faktor tingkat pendidikan, WP yang berpendidikan atau terpelajar memiliki kemungkinan moral pajak yang tinggi karena mereka lebih memahami aturan, dan dapat mematuhi undang-undang pajak yang berlaku. Selain itu, penelitian oleh Pasaribu & Tjen (2016) mengatakan bahwa sumber penghasilan juga berhubungan positif terhadap moral pajak. Responden yang bekerja menjadi pegawai negeri sipil lebih patuh daripada responden pengusaha. WP yang mempunyai tingkat kepercayaan (religiusitas) tinggi juga dinilai akan selalu taat serta patuh untuk melakukan kewajiban pajak, sehingga akan berpengaruh positif terhadap moral pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai beberapa faktor demografis yang mempengaruhi moral pajak. Penelitian Bilgin & Bilgin (2016) dan Berg (2017) berpendapat bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap tingkat moral pajak. Berbeda dengan penelitian lainnya, bukti empiris menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak memiliki hubungan dengan moral pajak seseorang dalam melaksanakan kewajiban pajak (Kondelaji et al., 2016). Dalam beberapa penelitian lain juga masih terdapat banyak perdebatan terkait pengaruh umur, tingkat pendidikan, sumber penghasilan, dan agama terhadap moral pajak. Sebagaimana dijabarkan di atas, moral pajak dianggap sebagai salah satu faktor penunjang dalam pemenuhan penerimaan negara, di mana semakin tinggi moral pajak, maka dapat diduga WP akan melakukan kewajiban pajaknya dengan patuh dan benar. Akan tetapi, masih terdapat *gap* antara penelitian satu dengan lainnya terkait faktor yang memiliki pengaruh terhadap moral pajak. Sejauh ini, belum terdapat penelitian secara khusus atas faktor-faktor penentu moral pajak di masa Covid-19. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, penelitian kali ini dimaksudkan untuk menyelidiki faktor-faktor apa yang bisa menjadi penentu moral pajak di saat krisis keuangan karena Covid-19.

Meningkatkan moral pajak dalam rangka mendorong kepatuhan WP juga membantu aksi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara untuk kepentingan bersama. Melalui penelitian ini, diharapkan DJP dapat membenahi kembali sasaran ekstensifikasi pajak, khususnya terkait dengan variabel demografis dalam penelitian ini. Dengan mengetahui sasaran yang memiliki moral pajak yang tinggi, maka DJP dapat meningkatkan kinerja dalam bidang ekonomi, khususnya akuntansi pajak.

METODE

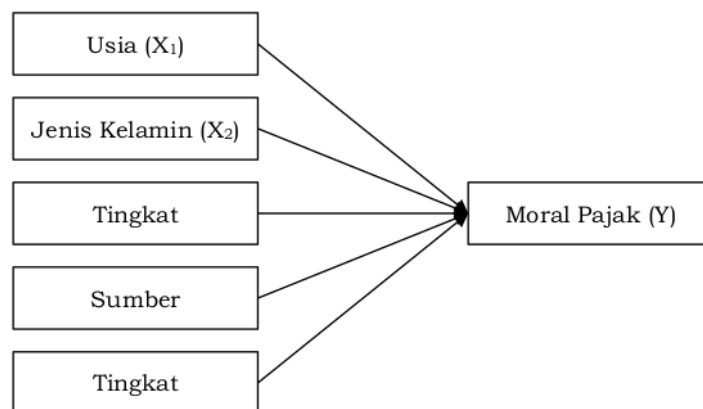
Dalam melakukan penelitian, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, sumber penghasilan, serta kepercayaan digunakan sebagai variabel independen. Sebaliknya, variabel dependen ditunjukkan oleh moral pajak. Dimensi umur berkaitan dengan pola pikir seseorang dalam melakukan pengambilan keputusan dalam semua hal termasuk kewajiban perpajakan. Dimensi jenis kelamin berkaitan dengan adanya perilaku pria dan wanita yang berbeda dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pasaribu dan Tjen (2016) berargumentasi bahwa pada hakikatnya perempuan akan lebih menggunakan perasaan, dan laki-laki menggunakan pemikiran atau logika yang membuat perempuan cenderung lebih memiliki sifat jujur jika dibandingkan dengan laki-laki, sehingga jenis kelamin berkaitan dengan perilaku seseorang terhadap moral pajak. Dimensi tingkat pendidikan berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan seseorang terhadap hukum dan aturan perpajakan.

Dimensi sumber penghasilan berkaitan dengan adanya perbedaan pengenaan pajak atas sumber penghasilan yang diduga dapat mempengaruhi moral dan kepatuhan pajak. Dimensi kepercayaan berkaitan dengan perilaku seseorang terhadap ketaatan dan komitmen seseorang yang cenderung dapat meningkatkan moral pajak. WP yang memiliki keyakinan akan menjalankan sesuai kebenaran agamanya dan menghindari perlakuan yang dilarang agama (Capanna et al., 2013). Kepercayaan atau agama memiliki hubungan yang kuat terhadap moral pajak yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang (Sá et al., 2014), di mana agama memberikan paham mengenai apa yang benar dan harus dilakukan, sehingga dapat mencegah perbuatan ilegal. Seluruh pertanyaan terkait umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, sumber penghasilan, dan kepercayaan dijabarkan dalam bagian aspek demografi yang tertera dalam kuesioner.

Moral pajak adalah suatu penentu untuk menjelaskan alasan dari kejujuran seseorang dalam perpajakan (Lionar, 2014). Baik perilaku individu maupun sikap dan pendirian individu diukur oleh moral pajak. Umumnya, moral pajak dapat dipengaruhi atau diwariskan dari sikap orang tua atau kerabat ataupun lingkungan sosial dan budaya (Brink & Porcano, 2016). WP cenderung membayar pajak seminimal mungkin, atau bahkan berusaha menghindari pembayaran pajak (Sumartaya & Hafidiah, 2014). Rendahnya kesadaran WP dalam membayar pajaknya dengan benar juga akan sangat mempengaruhi tingkat moral pajaknya. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur moral pajak berfokus pada upaya untuk menghindari pembayaran pajak, yang dijelaskan dalam kondisi tertentu, seperti adanya penyalahgunaan penggunaan pajak, korupsi, tarif pajak yang tinggi, dan ketidakadilan sistem pajak (Alasfour et al., 2016). Pertanyaan yang berkaitan dengan moral pajak akan menggunakan skala *Likert*. Pengukuran menggunakan skala *Likert* untuk kuesioner bagian moral pajak akan dibagi menjadi tujuh poin penelitian sebagai berikut: sangat setuju (7), setuju (6), agak setuju (5), netral (4), agak tidak setuju (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju (1).

Morrisan (2012) memaparkan bahwa populasi adalah suatu wilayah dimana memiliki objek atau subjek dengan kriteria tertentu untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Populasi yang digunakan adalah WP orang pribadi (WP OP) di wilayah Surabaya. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 150 WP dengan kriteria WP OP yang bekerja, pensiunan, dan tidak bekerja, WP OP yang berada di wilayah Surabaya Barat dan Surabaya Timur.

Metode penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Metode ini dibutuhkan untuk menganalisa keterkaitan hubungan variabel terikat (dependen) dan bebas (independen), dimana variabel independen yang digunakan sebanyak 5. Program *Software Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) akan digunakan untuk pengolahan data. SPSS sendiri merupakan suatu aplikasi untuk mengolah data statistik interaktif atau *batch* (Ghozali, 2016), yang dalam penelitian kali ini digunakan untuk mengamati faktor apa saja yang mempengaruhi moral pajak seseorang. Model data akan dipastikan melalui beberapa tahap pengujian sebelum menguji analisis regresi, yakni uji statistik deskriptif, uji kualitas data, yang terdiri dari uji reliabilitas dan uji validitas. Berikut adalah model analisis yang digunakan:



Gambar 1. Model Analisis

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

keterangan:

Y	= Moral Pajak
α	= Konstanta
β_{1-5}	= Koefisien regresi dari setiap variabel bebas
X ₁	= Umur
X ₂	= Jenis kelamin
X ₃	= Tingkat pendidikan
X ₄	= Sumber penghasilan
X ₅	= Kepercayaan
ε	= Residual/ Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistika deskriptif. Berdasarkan kuesioner, total responden yang didapat sebanyak 150 orang, yang merupakan WP OP yang bekerja, pensiunan, dan tidak bekerja yang berada di wilayah Surabaya Barat dan Surabaya Timur. Pembagian kuesioner terbagi secara merata dan didapatkan hasil sejumlah 65 responden pria (43,3%) dan 85 responden wanita (56,7%). Responden yang berumur kurang dari 30 tahun sejumlah 73 orang (48,7%), 30 hingga 40 tahun sejumlah 23 orang (15,3%), lebih dari 40 hingga 50 tahun sejumlah 35 orang (23,3%), dan lebih dari 50 tahun sejumlah 19 orang (12,7%). Ada pula yang memiliki tingkat pendidikan SMA, SMP, atau lebih rendah sejumlah 42 orang (28%), diploma sejumlah 15 orang (10%), sarjana sejumlah 89 orang (59,3%), dan magister sejumlah 4 orang (2,7%). Selain itu, responden yang memiliki sumber penghasilan sebagai karyawan sejumlah 48 orang (32%), wiraswasta sejumlah 55 orang (36,7%), pensiun sejumlah 5 orang (3,3%), dan tidak bekerja sejumlah 42 orang (28%). Responden yang memiliki kepercayaan Islam sejumlah 21 orang (14%), Kristen sejumlah 89 orang (59,3%), Katolik sejumlah 25 orang (16,7%), Hindu sejumlah 3 orang (2%), Buddha sejumlah 7 orang (4,7%), dan Konghucu sejumlah 5 orang (3,3%).

Data deskriptif menjelaskan nilai dari tiap variabel yang terdapat dalam riset, yakni nilai minimum, maksimum, rata-rata, serta standar deviasi. Tabel 1 memaparkan variabel moral pajak dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,610, sedangkan umur (2,367), jenis kelamin (2), tingkat pendidikan (2,273), sumber penghasilan (2,340), dan kepercayaan (2,560).

Tabel 1. Hasil Statistika Deskriptif

Variabel	Min	Max	Rata-rata	Standar Deviasi
Umur	1	4	2,367	1,111
Jenis Kelamin	1	2	2	0,497
Tingkat Pendidikan	1	4	2,273	0,923
Sumber Penghasilan	1	4	2,340	1,186
Kepercayaan	1	6	2,560	1,657
Moral Pajak	1	6,29	3,610	1,157

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Uji Kualitas Data. Reliabilitas diukur menggunakan *Cronbach's alpha*. Dalam mengambil keputusan, jika nilai $\alpha > 0,6$, maka hasil pengukuran dinyatakan *reliable* (handal). Sebaliknya, jika nilai $\alpha < 0,6$, maka hasil pengukuran tidak reliabel (tidak handal). Berdasarkan hasil tabel 2 dan 3, kesimpulannya adalah nilai *cronbach's alpha* semua variabel melebihi nilai pembanding yaitu 0,60, maka semua kuesioner variabel dependen dan variabel independen dinyatakan reliabel.

Tabel 2. Uji Reliabilitas Variabel X

Variabel X	Nilai Cronbach's Alpha
Umur	0,854
Jenis Kelamin	0,789
Tingkat Pendidikan	0,711
Sumber Penghasilan	0,813
Kepercayaan	0,814

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Tabel 3. Uji Reliabilitas Variabel Y

Nomor Butir Pertanyaan	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>
Y1.1	0,902
Y1.2	0,904
Y1.3	0,906
Y1.4	0,904
Y1.5	0,909
Y1.6	0,903
Y1.7	0,911
Y1.8	0,903
Y1.9	0,910
Y1.10	0,904
Y1.11	0,908
Y1.12	0,904
Y1.13	0,907
Y1.14	0,908
Y1.15	0,905
Y1.16	0,909
Y1.17	0,904

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Uji validitas diukur menggunakan *Pearson Correlation*. Uji ini akan melihat perbandingan antara R_{hitung} dan R_{tabel} ; jika R_{hitung} lebih besar daripada R_{tabel} yaitu 0,159, maka kuesioner yang digunakan dinyatakan valid, sedangkan apabila R_{tabel} lebih besar daripada R_{hitung} , maka kuesioner yang digunakan dinyatakan tidak valid. Berdasarkan tabel 4 dan 5 dapat disimpulkan untuk variabel dependen dan variabel independen, semua pertanyaan telah valid karena $R_{hitung} > R_{tabel}$.

Tabel 4. Uji Validitas Variabel X

Variabel X	r hitung
Umur	0,316
Jenis Kelamin	0,586
Tingkat pendidikan	0,182
Sumber Penghasilan	0,414
Kepercayaan	0,543

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Tabel 5. Uji Validitas Variabel Y

Nomor Butir Pertanyaan	r hitung
Y1.1	0,743
Y1.2	0,709
Y1.3	0,655
Y1.4	0,709
Y1.5	0,521
Y1.6	0,734
Y1.7	0,477
Y1.8	0,720
Y1.9	0,488

Y1.10	0,703
Y1.11	0,607
Y1.12	0,717
Y1.13	0,623
Y1.14	0,564
Y1.15	0,675
Y1.16	0,596
Y1.17	0,688

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Analisis Regresi. Penggunaan analisis regresi linear berganda adalah melihat arah dan besarnya pengaruh variabel terikat dengan variabel bebas (Ghozali, 2018). Untuk melakukan analisis regresi ini, beberapa persyaratan harus dipenuhi guna membuktikan benar tidaknya suatu penelitian. Hal ini akan dibuktikan dengan melakukan uji klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Uji Kolmogorov-Smirnov ditujukan untuk menentukan data penelitian berdistribusi normal atau tidak, dengan pertimbangan hasil signifikansi yang diperoleh apabila $> 0,05$ maka data dinyatakan normal. Hasil dari uji normalitas diperoleh perhitungan dengan tingkat nilai signifikansi sebesar 0,786 atau $> 0,05$, dimana menjelaskan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, penulis akan melakukan uji heteroskedastisitas yang berfungsi untuk memperlihatkan jenis residual yang mempunyai ketidaksamaan pada model regresi. Priyatno (2017) mengemukakan jika terjadi pola tertentu seperti bergelombang atau melebar, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika dilihat dari hasil uji tersebut, dengan melihat pola dari titik-titik dimana tidak terjadi pola tertentu, maka dapat disimpulkan data bebas heteroskedastisitas.

Selanjutnya melakukan uji t untuk memperlihatkan ikatan antara variabel yang sedang penulis teliti guna menanggapi rumusan masalah penelitian. Apabila tingkat signifikansi maksimal mencapai 0,05, maka terdapat perbedaan persepsi atas variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan, saat tingkat signifikansi melebihi 0,05, maka dapat dipastikan jika tidak terdapat perbedaan persepsi antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Jika melihat Tabel 6, dapat disimpulkan bahwa variabel umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan yang memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana tingkat signifikansi berada di bawah 0,05. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap variabel dependen moral pajak berdasarkan variabel independen yaitu umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Selain itu, berdasarkan Tabel 6, dapat disimpulkan hasil regresi linear berganda, yaitu:

$$Y = 1,1611 + 0,338X_1 + 0,674X_2 + 0,165X_3 - 0,034X_4 - 0,036X_5$$

Tabel 6. Uji t

Model	unstandardized coefficients B	t	sig.
(constant)	1,1611	9,101	<0,001
Umur	0,338	10,728	<0,001
Jenis Kelamin	0,674	9,707	<0,001
Tingkat Pendidikan	0,165	4,541	<0,001
Sumber Penghasilan	-0,034	-0,832	0,407
Kepercayaan	-0,036	-1,751	0,082

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Setelah melakukan uji t, penulis melakukan uji R untuk melihat besaran kontribusi simultan variabel bebas atas variabel terikat. Dalam pengujian ini, jika data didapatkan nilai *adjusted* R² yang mendekati nol, maka model penelitian memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, apabila dalam pengujian data didapatkan nilai *adjusted* R² mendekati satu, maka model penelitian dinilai mampu menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan tabel 7, nilai *Adjusted* R² yang dihasilkan adalah 0,602, artinya model yang menggambarkan pengaruh variabel bebas yaitu umur,

jenis kelamin, tingkat pendidikan, sumber penghasilan, dan kepercayaan (X) mampu menjelaskan variabel dependen moral pajak (Y) dengan persentase 60,2%. Sisanya, 39,8% dijelaskan variabel lain.

Tabel 7. Uji R

model	R	R square	adjusted R square	Std. error of the estimate
1	0,784 ^a	0,615	0,602	0,41498

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Pengujian terakhir adalah Anova, untuk menganalisa kecocokan model regresi dari penelitian. Uji Anova akan melihat kecocokan model regresi linier variabel dependen dan variabel independen. Tabel 8 menunjukkan nilai F_{hitung} dengan angka 46,014 di mana $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu 2,276 dan tingkat sig. < 0,05, sebesar <,001^b. Hal ini mengindikasikan model regresi sesuai untuk mengetahui perbedaan persepsi semua variabel bebas (X) terhadap variabel terikat moral pajak (Y).

Tabel 8. Uji Anova

Model	sum of square	Df	Mean Square	F	sig.
Regression	39,620	5	7,924	46,014	<,001 ^b
Residual	24,798	144	0,172		
Total	64,418	148			

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Perbedaan Persepsi terhadap Moral Pajak berdasarkan Umur. Umur dikatakan seperti salah satu faktor terpenting yang nyatanya bisa mempengaruhi moral pajak seseorang. Hubungan ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan generasi dan pengalaman seseorang. Pengujian perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan umur menunjukkan hasil nilai sig. < 0,05 yaitu <0,001 dan memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga menunjukkan terdapat perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan umur. Berdasarkan tabel 9, hasil penelitian menunjukkan bahwa umur lebih dari 40 hingga 50 tahun memiliki mean dan standar deviasi yang paling kecil yaitu 3,441 dan 1,049, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tua umur akan cenderung memiliki moral pajak lebih tinggi dibanding dengan umur muda. Hal ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya oleh Bilgin & Bilgin (2016) yang menyatakan umur yang lebih dewasa akan lebih patuh terhadap peraturan undang-undang daripada yang lebih muda. Berg (2017) juga menyatakan bahwa semakin meningkatnya umur seseorang akan meningkatkan moral pajak seseorang.

Kombinasi antara variabel moral pajak dan variabel umur sangatlah kuat sehingga memberikan pengaruh yang besar. Moral pajak akan semakin baik dimana seseorang semakin bertambah umurnya karena WP dengan umur lebih tua terkadang memiliki kepatuhan yang lebih daripada WP yang berumur lebih muda (Aryati, 2012). Sama seperti yang dikatakan oleh Hokamp (2014) bahwa lansia akan lebih patuh dan menghindari penghindaran pajak karena evolusi norma-norma selama siklus hidupnya. Ini berarti bahwa WP berumur lanjut (lansia) umumnya lebih sensitif terhadap ancaman sanksi karena adanya status sosial, dan dengan demikian menunjukkan ketergantungan yang lebih kuat pada reaksi dari orang lain, sehingga potensi biaya sanksi meningkat. Dengan adanya ancaman dan potensi sanksi tersebut, WP lansia akan cenderung menjadi taat dalam membayarkan pajak sebagaimana mestinya, sehingga moral pajaknya pun akan tinggi. Hal ini dibuktikan oleh penelitian ini bahwa saat usia semakin bertambah, maka moral pajak untuk memenuhi kepatuhan perpajakan juga. Oleh sebab itu, umur dapat dikatakan sangat mempengaruhi moral pajak seseorang.

Tabel 9. Rata-rata Moral Pajak * Umur Responden

Umur Responden	Mean	N	Std. Deviation
kurang dari 30	3,583	73	1,982
30 hingga 40	3,875	23	1,410
lebih dari 40 hingga 50	3,441	35	1,049
lebih dari 50	3,706	19	1,600

Total	3,610	150	1,158
-------	-------	-----	-------

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Perbedaan Persepsi terhadap Moral Pajak berdasarkan Jenis Kelamin. Jenis kelamin dipandang sebagai penyebab lain yang memiliki dampak terhadap perilaku moral pajak seorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana seorang WP berjenis kelamin pria atau wanita mau berkomitmen dalam berperilaku taat pajak. Pengujian perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan jenis kelamin menunjukkan nilai sig. $< 0,05$ yaitu $< 0,001$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan jenis kelamin, sehingga jenis kelamin mempengaruhi moral pajak seseorang. Tabel 10 menunjukkan nilai *mean* dan *standard deviation* wanita yaitu 3,595 dan 1,117 lebih kecil dibandingkan milik pria. Dengan demikian, wanita dikatakan memiliki tingkat moral pajak lebih tinggi daripada pria.

Hal tersebut dapat terjadi karena pria cenderung bersifat *risk taker* yang berarti memiliki rasa keberanian dalam pengambilan risiko dan mengupayakan berbagai cara untuk mendapatkan keinginannya, sehingga kurang peduli terhadap aturan pajak dan sanksi perpajakan. Pada dasarnya, wanita cenderung membayar pajak beralasan hati nurani yang membuatnya merasa bersalah saat tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan jumlah seharusnya. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Bilgin & Bilgin (2016) yang menyebutkan antara jenis kelamin dan moral pajak seseorang memiliki pengaruh signifikan, yang mana penelitian ini menyatakan bahwa wanita memiliki moral pajak lebih tinggi daripada pria. Selain itu, wanita akan lebih taat dalam melakukan kewajiban perpajakan karena lebih peka dan patuh kepada peraturan sehingga tingkat moral pajaknya akan lebih tinggi daripada pria (Berg, 2017; Finocchiaro & Rizzo, 2014). Horodnic (2018) juga memaparkan bahwa moral pajak biasanya lebih tinggi di kalangan wanita. Dengan demikian, diharapkan bagi wanita dan pria untuk meningkatkan komitmen dalam kewajiban perpajakannya.

Tabel 10. Rata-rata Moral Pajak * Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Mean	N	Std. Deviation
Pria	3,630	65	1,216
Wanita	3,595	85	1,117
Total	3,610	150	1,157

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Perbedaan Persepsi terhadap Moral Pajak berdasarkan Tingkat Pendidikan. Pendidikan dapat dikatakan seperti bagaimana manusia mengembangkan sumber daya yang dilakukan secara teratur, pragmatis, dan bertahap untuk memberikan hasil yang berkualitas, yang nantinya dapat memberikan manfaat, meningkatkan harkat dan martabat, serta mengembangkan keterampilan dan membentuk karakter serta bangsa yang bermartabat.

Pengujian perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan hasil nilai tingkat sig. $< 0,05$ yaitu $< 0,001$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hasil itu memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel 11, tingkat pendidikan Magister (S2) memiliki mean dan standar deviasi yang paling kecil dibandingkan tingkat pendidikan lain yaitu 3,265 dan 0,927. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingginya tingkat pendidikan seseorang akan meningkatkan moral pajaknya.

Bersumber dari kajian teoritis, berargumentasi bahwa kepatuhan dalam membayar pajak sering kali karena tingkat pendidikan seseorang (Castaneda, 2017). Kwok & Yip (2018) menyuarakan bahwa wajib pajak yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih tau tentang ketentuan perpajakan daripada wajib pajak dengan pendidikan rendah. Ibrahim et al (2015) juga menyatakan jika motivasi seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Data yang diperoleh sudah mampu untuk menyatakan adanya pemaparan ini. Data memperlihatkan bahwa kebanyakan wajib pajak di Surabaya adalah lulusan Sarjana (S1).

Hasil ini konsisten dengan penelitian Berg (2017) yang menyebutkan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka wajib pajak akan lebih paham mengenai kontribusi pajak dan keuntungan pembayaran pajak, juga tidak sulit untuk paham akan ketentuan dan undang-undang pajak yang berlaku, sehingga tingkat moral pajak pastinya akan meningkat. Dari ungkapan tersebut kesimpulannya adalah saat orang memiliki pendidikan yang tinggi, dianggap lebih taat dalam

kewajiban perpajakannya. Penelitian oleh Rodriguez-Justicia & Theilen (2018) mengemukakan tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap moral pajak seseorang. Berdasarkan penelitian ini, tingkat pendidikan merupakan saluran penting terhadap psikologis pajak seseorang, maka sebelum menjadi wajib pajak diharapkan untuk mencapai tingkat pendidikan tertinggi. Dengan demikian, tingkat pendidikan menengah atau tinggi akan lebih cenderung menunjukkan moral pajak yang tinggi dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah.

Tabel 11. Rata-rata Moral Pajak * Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Mean	N	Std. Deviation
SMA, SMP, atau lebih rendah	3,440	42	1,356
Diploma	4,232	15	1,085
Sarjana (S1)	3,601	89	1,054
Magister (S2)	3,265	4	0,927
Total	3,610	150	1,157

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Perbedaan Persepsi terhadap Moral Pajak berdasarkan Sumber Penghasilan. Pengujian perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan sumber penghasilan menunjukkan nilai sig. > 0,05 yaitu 0,407 dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ sehingga menunjukkan tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan sumber penghasilan. Hasil dari penelitian ini berarti sumber penghasilan yang berbeda-beda tidak mempengaruhi persepsi seseorang terhadap moral pajak, sehingga tidak sejalan dengan penelitian Bilgin & Bilgin (2016) yang menemukan adanya perbedaan persepsi moral pajak antara karyawan, pensiunan, pengusaha, serta orang yang tidak bekerja, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pensiunan dan pelajar memiliki hubungan positif terhadap moral pajak, dan pensiunan lebih bermoral pajak tinggi daripada karyawan.

Bilgin (2014) menyebutkan bahwa ketidakpatuhan dalam perpajakan biasanya ditimbulkan karena perbedaan sudut pandang atas pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Perbedaan sudut pandang inilah yang biasanya menimbulkan ketidakserasian antara masyarakat dengan pemerintah. Masuknya Covid-19 yang sangat berpengaruh pada keuangan seseorang adalah salah satu dilema wajib pajak dalam melakukan pembayaran perpajakannya. Hal tersebut disimpulkan bahwa perbedaan pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang yang sumber penghasilannya sebagai karyawan, pengusaha atau pekerja bebas, bahkan seseorang yang tidak bekerja dapat mempengaruhi moral pajaknya. Tetapi pada hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor sumber penghasilan tidak memiliki pengaruh terhadap moral pajak seseorang. Jawaban oleh responden menunjukkan banyaknya orang yang bekerja sebagai pengusaha, dan tidak dapat membuktikan bahwa perbedaan sumber penghasilan bisa membuat wajib pajak tidak taat dalam pembayaran pajaknya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sekalipun wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan dimana sudah menjadi kewajiban pemberi kerja untuk memotong pajak karyawannya, tidak mempengaruhi moral pajak seseorang.

Perbedaan Persepsi terhadap Moral Pajak berdasarkan Kepercayaan. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku seseorang dan dianggap sebagai kesalehan individu (Nazaruddin, 2019). Prinsip agama diajarkan kepada masyarakat untuk bertindak sesuai norma dan hukum yang ada di Indonesia. Alm & Torgler (2014) menyebutkan jika religiusitas mungkin akan berpengaruh kepada kebiasaan seseorang yang bisa menyebabkan penghindaran perpajakan. Dalam hal ini, bisa disimpulkan jika tingkat religiusitas yang melekat pada diri seseorang tinggi, maka orang tersebut diyakini bisa mengontrol perilakunya dengan menyingkirkan sikap yang tidak bermoral atau tidak etis. WP yang memiliki kepercayaan atau agama cenderung akan takut melakukan hal yang tidak sejalan atau bisa diartikan tidak bermoral seperti rasa takut jika tidak patuh atau tidak taat dengan peraturan perpajakan yang ada.

Berdasarkan kepercayaan yang ada di Indonesia, ada enam kepercayaan yang dapat dianut para WP. Perbedaan keyakinan atau kepercayaan yang dianut seseorang dimungkinkan untuk memiliki persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda mengenai ketaatan dan kebenaran. Dengan adanya kepercayaan yang dimiliki seseorang, dianggap bahwa mereka telah diajarkan etika dan moral-moral sehingga bisa membentuk perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Mohdali (2014) menyatakan dimana saat peran agama dalam hidup wajib pajak itu hadir, kemungkinan dapat

memicu wajib pajak untuk melakukan perilaku positif serta mencegah perilaku buruk terhadap ketaatan pajak yang bisa menaikkan moral pajak seseorang.

Pengujian perbedaan persepsi terhadap moral pajak berdasarkan kepercayaan menunjukkan hasil nilai tingkat sig. > 0,05 yaitu 0,082 dan $t_{hitung} < t_{tabel}$. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa kepercayaan seseorang tidak mempengaruhi persepsi seseorang terhadap moral pajak, sehingga hal ini bertentangan dengan penelitian Bilgin & Bilgin (2016), yang berisi adanya perbedaan kepercayaan dapat mempengaruhi moral pajak seseorang dalam pemahaman untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar dan jujur. Maka dari itu, kesimpulannya yang dapat diambil adalah tingkat moral pajak seseorang tidak dipengaruhi oleh agama atau kepercayaan yang dianut. Hal ini mendukung pernyataan Horodnic (2018) dan Ibrahim et al (2015) yang berargumen bahwa adanya perbedaan agama tidak memiliki pengaruh terhadap moral pajak seseorang.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan akan mempengaruhi moral pajak. Berdasarkan temuan ini, pemerintah melalui DJP hendaknya mulai memikirkan cara-cara sosialisasi dan upaya membangun *awareness* pajak dengan mempertimbangkan faktor demografis masyarakat. Perlu ada suatu sistem “marketing” yang unik bagi setiap WP atau WP potensial yang berbeda umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. DJP sudah harus berani mengalokasikan anggaran yang lebih ada upaya membangun dan memelihara moral pajak ini, dengan menasar kelompok demografis yang berbeda-beda. Sementara, di sisi lain, DJP juga dapat mempertimbangkan menggunakan *influencer* yang disesuaikan dengan perbedaan profil demografis di atas. Dengan kata lain, harus ada proporsi yang berimbang antara sasaran sosialisasi, dan pemberi materi, berdasarkan fitur demografis.

Apabila dikembangkan lebih jauh, upaya DJP meningkatkan kepatuhan pajak pada WP melalui intensifikasi, baik itu pemeriksaan maupun penelitian, selayaknya perlu mempertimbangkan karakter setiap fitur demografis yang ada. Pendekatan pemeriksaan pajak pada seorang WP milenial tentu harus berbeda dengan WP *baby boomer*; pendekatan kepada seorang WP wanita harus berbeda dengan WP pria; demikian halnya, harus ada strategi peningkatan kepatuhan pajak yang berbeda terhadap WP yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu diharapkan mampu untuk menjangkau responden yang lebih banyak dan lebih luas, serta menambah variabel demografi lainnya seperti status pernikahan, atau variabel selain demografi seperti pengaruh kepercayaan terhadap sistem hukum, kebanggaan nasional, persepsi terkait tingkat korupsi, efisiensi pengeluaran pemerintah, sistem pajak yang adil, tarif pajak, dan kendala keuangan terhadap moral pajak setiap individu agar dapat semakin detail dalam menganalisis faktor-faktor yang menjadi penentu moral pajak seseorang, khususnya saat terjadi Covid-19.

REFERENCES

- Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2016). The determinants of tax morale and tax compliance: Evidence from Jordan. In *Advances in Taxation* (Vol. 23). <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023005>
- Alm, J. R., & Torgler, B. (2014). Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe. *SSRN Electronic Journal*, March 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.562861>
- Aryati, T. (2012). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen Universitas Trisakti*, 25(1), 13–29.,
- Benk, S., Budak, T., Yüzba, B., & Mohdali, R. (2016). The Impact of Religiosity hidayatullohTax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers. *Religions*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/rel7040037>
- Berg, M.A. (2017). *Tax morale and behaviour*. November, 335.
- Bilgin, C. (2014). Determinants of tax morale in Spain and Turkey: An empirical analysis. *European Journal of Government and Economics*, 3(1), 60–74. <https://doi.org/10.17979/ejge.2014.3.1.4297>
- Bilgin, C., & Bilgin, H. K. (2016). An Empirical Analysis of Tax Morale in Bosnia-Herzegovina. *Balkan Journal of Social Science*, Vol. 5, pp. 166-183.
- Brink, W. D., & Porcano, T. M. (2016). The impact of culture and economic structure on tax morale and tax evasion: A country-level analysis using SEM. In *Advances in Taxation* (Vol. 23). <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023004>

- Capanna, C., Stratta, P., Collazzoni, A., & Rossi, A. (2013). Construct and concurrent validity of the Italian version of the Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality. *Psychology of Religion and Spirituality*, 5(4), 316–324. <https://doi.org/10.1037/a0033642>
- Castañeda Rodríguez, V. M. (2017). La equidad del sistema tributario y su relación con la moral tributaria. Un estudio para América Latina. *Investigación Económica*, 76 Cas(299), 125–152. <https://doi.org/10.1016/j.inveco.2017.02.002>
- Finocchiaro Castro, M., & Rizzo, I. (2014). Tax compliance under horizontal and vertical equity conditions: An experimental approach. *International Tax and Public Finance*, 21(4), 560–577. <https://doi.org/10.1007/s10797-014-9320-5>
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Hokamp, S. (2014). Dynamics of tax evasion with back auditing, social norm updating, and public goods provision - An agent-based simulation. *Journal of Economic Psychology*, 40, 187–199. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2013.01.006>
- Horodnic, I. A. (2018). Tax morale and institutional theory: a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38(9–10), 868–886. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2018-0039>
- Ibrahim, M., Musah, A., & Abdul-Hanan, A. (2015). Beyond enforcement: what drives tax morale in Ghana? *Humanomics, Emerald Group Publishing Limited*, 31(4), 399–414.
- Kondelaji, M. H. H., Sameti, M., Amiri, H., & Moayedfar, R. (2016). Analyzing determinants of tax morale based on social psychology theory: Case study of Iran. *Iranian Economic Review*, 20(4), 581–598. <https://doi.org/10.22059/ier.2016.59611>
- Kwok, B. Y. S., & Yip, R. W. Y. (2018). Is Tax Education Good or Evil for Boosting Tax Compliance? Evidence from Hong Kong. *Asian Economic Journal*, 32(4), 359–386. <https://doi.org/10.1111/asej.12163>
- Lionar, H. (2014). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebanggaan Nasional, Persepsi Atas Penggelapan Pajak, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak WPOP Dengan Moral Pajak Sebagai Variabel Intervening. Skripsi. *FBE, Akuntansi Pajak*, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71–91. <https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2013-0061>
- Morissan M.A. (2012). Metode Penelitian Survei. *Kencana*, Jakarta.
- Mulyani, S., Budiman, N. A., & Sakinah, R. M. (2020). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1), 9–21. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1080>
- Nazaruddin, I. (2019). The Role of Religiosity and Patriotism in Improving Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2001111>
- Ocheni, S. (2015). A causality analysis between tax compliance behaviour and Nigerian economic growth. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(1S1), 577–582. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n1s1p577>
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 145–162. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i2.2696>
- Priyatno, Duwi. (2017). Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS. *Andi Publisher*.
- Rodriguez-Justicia, D., & Theilen, B. (2018). Education and tax morale. *Journal of Economic Psychology*, 64(October), 18–48. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.10.001>
- Sá, C., Martins, A., & Gomes, C. (2014). Tax morale, Occupation and Income Level: An Analysis of Portuguese Taxpayers. *Journal of Economics, Business and Management*, 2(2), 112–116. <https://doi.org/10.7763/joebm.2014.v2.108>
- Sumartaya, D., & Hafidiah, A. (2014). The Influence Of Taxpayer's Awareness And Tax Morale Toward Tax Evasion. *International Journal of Business, Economics and Law*, 5(1), 9.
- Widianto, R. (2015). The effect of demographic factors on individual tax compliance in Duren Sawit (East Jakarta, Indonesia). *International Institute of Social Studies*, 67.

Plagiasi Tiga Jesselyn Marchella

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

2

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1%

3

text-id.123dok.com

Internet Source

<1%

4

123dok.com

Internet Source

<1%

5

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1%

6

www.scribd.com

Internet Source

<1%

7

docobook.com

Internet Source

<1%

8

pt.scribd.com

Internet Source

<1%

9

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1%

10	conference.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
11	kc.umn.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
14	sites.google.com Internet Source	<1 %
15	docplayer.info Internet Source	<1 %
16	repository.unand.ac.id Internet Source	<1 %
17	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	<1 %
18	eprints.dinus.ac.id Internet Source	<1 %
19	id.123dok.com Internet Source	<1 %
20	jurnal.ibik.ac.id Internet Source	<1 %
21	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %

22

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

23

lib.ibs.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Plagiasi Tiga Jesselyn Marchella

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11